

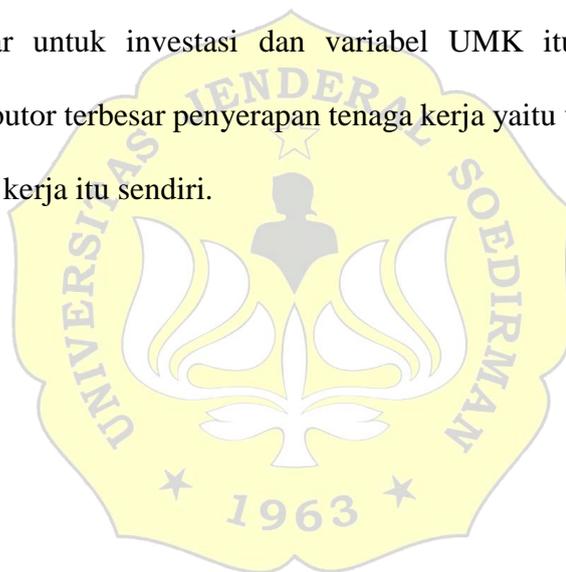
BAB V. SIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Kesimpulan

1. Pengangguran di Kabupaten Banyumas didominasi oleh penduduk dengan tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan tidak tamat SD. Pada kategori usia, penduduk dengan usia rentang 18-34 tahun memiliki tingkat pengangguran tertinggi di Kabupaten Banyumas.
2. Variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki hubungan kausalitas satu arah dengan variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Begitu juga dengan variabel IPM, PDRB dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) memiliki hubungan kausalitas satu arah dengan investasi.
3. Pada jangka panjang, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) berpengaruh negatif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Berbanding terbalik dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif signifikan dan investasi yang berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Pada jangka pendek, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif signifikan terhadap Upah Minimum Kabupaten (UMK). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan UMK berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. terakhir ada UMK berpengaruh signifikan terhadap investasi.

4. Guncangan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan investasi memberikan respon positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Namun, guncangan pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) memberikan respon yang negatif terhadap penyerapan tenaga kerja.
5. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi kontributor terbesar untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan variabel PDRB itu sendiri. Upah Minimum Kabupaten (UMK) menjadi kontributor terbesar untuk investasi dan variabel UMK itu sendiri. Terakhir kontributor terbesar penyerapan tenaga kerja yaitu variabel penyerapan tenaga kerja itu sendiri.



B. Implikasi

1. Kebijakan yang dapat pemerintah Kabupaten Banyumas pertimbangkan untuk mengatasi pengangguran di Kabupaten Banyumas yaitu dengan peningkatan akses pendidikan, program pelatihan vokasi, membangun kemitraan antara pemerintah dan swasta agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak.
2. Peningkatan pendapatan perkapita, kualitas hidup, akses terhadap pendidikan dan kesehatan serta infrastruktur merupakan saran kebijakan agar PDRB dapat berpengaruh terhadap IPM. Selain itu, pertimbangan dalam memutuskan kebijakan juga harus memperhatikan IPM, PDRB dan UMK seperti diversifikasi ekonomi, peningkatan daya saing dan iklim investasi yang baik sehingga dapat mempengaruhi investasi Kabupaten Banyumas.
3. Kebijakan yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah Kabupaten Banyumas untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja yaitu pertumbuhan ekonomi yang inklusif, peningkatan kualitas hidup, peningkatan produktivitas dan kebijakan upah. Selain itu, kebijakan untuk investasi yaitu penciptaan iklim investasi yang kondusif, pengembangan UMKM dan peningkatan produktivitas tenaga kerja.
4. Kebijakan yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah Kabupaten Banyumas terkait pembangunan manusia dan investasi yaitu perlunya langkah strategis untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja seperti investasi berkelanjutan dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM),

kebijakan pembangunan berbasis IPM, investasi pada sektor padat karya dan peningkatan daya tarik investasi. selain itu, kebijakan terkait Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) yaitu adanya diversifikasi ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, penyesuaian UMK yang bertahap, dan peningkatan produktivitas tenaga kerja.

5. Kebijakan yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah Kabupaten Banyumas dalam mengoptimalkan setiap kontributor pada masing-masing variabel yaitu penguatan infrastruktur, diversifikasi ekonomi, kebijakan pertumbuhan yang berorientasi pada kesejahteraan, peningkatan keterampilan tenaga kerja, penyesuaian UMK yang strategis dan lapangan kerja yang berkelanjutan.

